



DEWAN PERWAKILAN RAKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Jumat, 07 November 2025



Ketua H. Abdillah Nashih Wakil Ketua Suyarno, S.H., M.H. Wakil Ketua H. Kayan, SH Wakil Ketua Warid Andono, SE

RINGKASAN BERITA HARI INI

Fly Over Gedangan Disiapkan Pecah Kemacetan Sidoarjo

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan rencana pembangunan fly over di Gedangan sebagai upaya untuk memecah kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut. Proyek ini akan menghubungkan Jalan Raya Garuda dengan Jalan Raya Kertosono.

Hujan Deras Picu Banjir di Empat Kawasan

SIDOARJO - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sidoarjo sejak sore tadi menyebabkan banjir di empat kawasan, yaitu Kecamatan Duren, Kertosono, dan lainnya. Warga diimbau untuk waspada dan menghindari banjir.

Mobil Mbrebet Bisa Ajukan Reimburse hingga Rp 600 Ribu

SIDOARJO - Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mengumumkan bahwa pemilik mobil yang mengalami kecelakaan atau mogok di jalan raya dapat mengajukan reimbursement hingga Rp 600.000.

PENGADILAN NEGERI



DALAM PEMBANGUNAN: Proyek gedung Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo ditargetkan selesai akhir tahun ini. Anggaran untuk konstruksi fisik bangunan itu mencapai Rp 29 miliar.

Gedung Baru Punya Delapan Ruang Sidang



TP PKK Sidoarjo Bekali Calon Pengantin Edukasi Cegah Stunting, AKI, dan AKB

SIDOARJO - Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo menggelar edukasi untuk calon pengantin mengenai pencegahan stunting, Akut Komplikasi Ibu (AKI), dan Akut Komplikasi Bayi (AKB).

Mobil Mbrebet Bisa Ajukan Reimburse hingga Rp 600 Ribu

SIDOARJO - Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mengumumkan bahwa pemilik mobil yang mengalami kecelakaan atau mogok di jalan raya dapat mengajukan reimbursement hingga Rp 600.000.

Bupati dan Dankodaerl V Bahas Sinergi Pembangunan dan Keamanan

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo dan Dankodaliterasi V membahas sinergi pembangunan dan keamanan dalam kunjungan ke Surabaya.

Jemaah Segera Lumasi Biaya Haji

SIDOARJO - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo mengingatkan jemaah haji untuk segera lumasi biaya haji.



Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.



Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.



Dampingi Pongpes Urus Izin Bangunan, Pemkab Sidoarjo Gandeng Akademisi

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendampingi Pongpes (Pondok Pesantren) dalam mengurus izin bangunan dengan menggandeng akademisi.



SATPOL PP

SATPOL PP Kabupaten Sidoarjo melakukan patroli rutin di berbagai lokasi strategis.

TBC Sasar Usia 0-14 Tahun

Dinkes Targetkan 1.100 Skrining Tahun Ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menargetkan 1.100 skrining TB di kalangan usia 0-14 tahun.

Dampingi Pongpes Urus Izin Bangunan, Pemkab Sidoarjo Gandeng Akademisi

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendampingi Pongpes (Pondok Pesantren) dalam mengurus izin bangunan dengan menggandeng akademisi.

Bongkar Dua Tiang Reklame Tak Berizin

SIDOARJO - Dua tiang reklame dari besi yang terpasang di Jalan Raya Waru dibongkar Satpol PP Kabupaten Sidoarjo karena belum lengkap izinnya.

Bongkar Dua Tiang Reklame Tak Berizin

SIDOARJO - Dua tiang reklame dari besi yang terpasang di Jalan Raya Waru dibongkar Satpol PP Kabupaten Sidoarjo karena belum lengkap izinnya.

Perkuat Sinergi, Bupati Terima Kunjungan Dankodaerl V Surabaya

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo menerima kunjungan Dankodaliterasi V Surabaya untuk memperkuat sinergi pembangunan dan keamanan.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

SIDOARJO - Program pendirian Apotek Desa Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan. Meskipun sempat digadang-gadang, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Fly Over Gedangan Disiapkan Pecah Kemacetan Sidoarjo

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiapkan langkah strategis untuk mengurai kemacetan parah yang kerap terjadi di perempatan Gedangan.

Melalui rencana pembangunan Fly Over Gedangan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk tahap awal pembebasan lahan yang dijadwalkan dimulai pada tahun 2026 mendatang.

Bupati Sidoarjo Subandi menyebutkan, total kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan mencapai Rp340 miliar. Sementara anggaran yang telah disiapkan melalui APBD baru mencakup sebagian kebutuhan.

"Agar tidak membebani APBD Sidoarjo,

kami akan mengajukan proposal ke Balai Besar untuk menutupi kekurangan biaya yang ada," ujar Subandi, Kamis (6/11).

Rencana pembangunan fly over tersebut menjadi salah satu proyek prioritas Pemkab Sidoarjo dalam upaya mengurai kemacetan di kawasan selatan. Perempatan Gedangan selama ini dikenal sebagai salah satu simpul lalu lintas tersibuk di Sidoarjo karena menjadi jalur utama kendaraan dari dan menuju Surabaya serta jalur industri.

Berdasarkan rencana tata letak (layout) yang telah disiapkan, Fly Over Gedangan akan dibangun dari arah utara ke barat, dengan pelebaran jalan di sisi kanan dan kiri selebar total sekitar 10 meter. Proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang

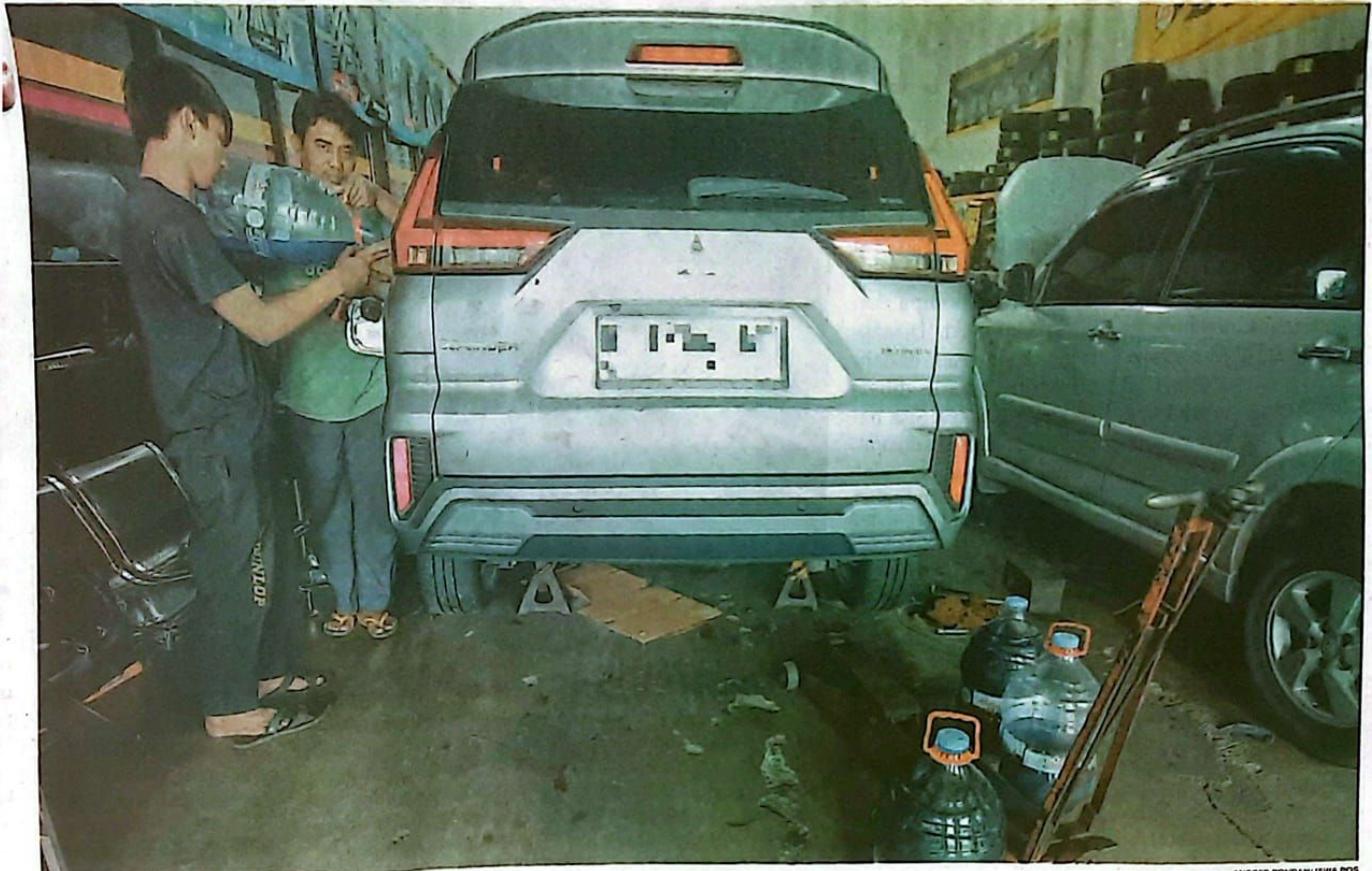
bagi permasalahan transportasi di wilayah tersebut.

"Kami berharap setelah fly over ini terbangun, persoalan kemacetan yang selama ini membelit kawasan Gedangan bisa terurai satu per satu," kata Subandi.

Sejumlah warga menyambut baik rencana pembangunan fly over tersebut. "Kalau benar jadi dibangun, pasti sangat membantu. Tiap hari macetnya luar biasa, apalagi jam berangkat dan pulang kerja," ujar Yudi, warga Gedangan.

Pemkab Sidoarjo memastikan proses perencanaan dan koordinasi lintas instansi terus berjalan agar pembangunan Fly Over Gedangan dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. **(udi)**





ANGGER BOHDANI/JAWA POS

GANTI RON 92: Krisna (kiri) dan Ninung, mekanik bengkel mobil Ariesta, Sidoarjo, Jawa Timur, menuang pertamax ke tangki mobil yang telah selesai diservis kemarin (6/11).

Mobil Mbrebet Bisa Ajukan Reimburse hingga Rp 600 Ribu

- Hanya untuk Perbaikan Mesin, Tidak Termasuk BBM Pengganti
- Mekanik Sebut Kualitas Peralite Turun dan Ada Endapan Air

SIDOARJO - Fenomena mobil *mbrebet* setelah diisi pertalite belum berakhir. Bengkel Ariesta di Jalan Raya Cemengkalang, Sidoarjo,

misalnya. Bengkel rekanan Pertamina itu menerima keluhan setiap hari sejak sepekan terakhir ■

Baca Mobil... Hal 2



DIKOSONGKAN:
Tangki bensin mobil dibongkar untuk membersihkan BBM yang diduga bercampur air.

TAZOIA AULIA ZALZABILAH/JAWA POS

Jawa Pos

Mobil Mbrevet Bisa Ajukan Reimburse hingga Rp 600 Ribu

Sambungan dari Hal 1

Eka Ariesta, kepala bengkel, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menangani tujuh mobil mbrevet. Bengkelnya mulai membuka layanan klaim biaya sesuai petunjuk Pertamina Sabtu (1/11) lalu. "Tetapi, sebelumnya juga ada yang datang," katanya kemarin (6/11).

Kendaraan yang bermasalah di bengkelnya bervariasi. Ada Avanza, Innova, Agya, sampai Xpander. Mobil yang rewel, kata perempuan 36 tahun itu, mendapat dua tindakan dari mekanik. Yakni, pemeriksaan busi dan ruang bahan bakar. "Untuk memastikan, tangki harus dicopot," terangnya.

Eka mengungkapkan, busi mobil yang mbrevet kondisinya selalu berkerak. Bagian atas terdapat abu pu-

ti. Kondisi itu akibat pembakaran yang tidak maksimal. Menurut dia, kalau masih memungkinkan, busi hanya dibersihkan. Begitu juga dengan pompa dan filter pada tangki. "Di tangki juga kadang ada endapan sehingga harus dibersihkan," jelasnya. Sisa bahan bakar otomatis dikuras.

Khairul Mubarak, salah satu pemilik mobil mbrevet, mengaku membeli pertalite di kawasan Perak, Surabaya Rabu (5/11) sore. Dia menyebut, sekitar 100 meter dari SPBU, mobil terasa mbrevet. "RPM-nya naik turun yang kemungkinan besar akar masalahnya di bahan bakar," kata pemilik Xpander keluaran 2024 itu.

Dia pun menyoroti tata cara klaim biaya yang dinilai merepotkan. Khairul sempat ditolak karena tidak bawa



CEK KOMPRESI: Ninung, mekanik bengkel mobil Ariesta, Sidoarjo, memeriksa kondisi mesin sesuai diservis kemarin (6/11).

nota. Padahal, dia punya bukti pembayaran e-money. Beruntung, bengkel memfasilitasinya untuk berkomunikasi dengan Pertamina. Dia akhirnya mendapat toleransi. "Kan tidak semua konsumen yang beli di SPBU minta nota setelah

pengisian," tuturnya.

Warga Perumahan Pondok Mutiara, Sidoarjo Kota, itu juga berharap Pertamina tidak hanya memfasilitasi biaya perbaikan. Tetapi, juga mengganti bahan bakar yang sudah dibeli. "Konsumen pasti beli ba-

han bakar baru setelah perbaikan," ujarnya.

Bau Tidak Wajar

Dugaan penurunan kualitas pertalite terus menjadi sorotan. Kepala mekanik Pertamina Fastron Auto Service General Motor Partnership (PFAS GMP) Krembangan, Heri, mengungkapkan bahwa gejala perubahan kualitas tersebut sudah terdeteksi sebelum kasus kendaraan mbrevet ramai dibicarakan publik.

Menurut Heri, perubahan paling mencolok terlihat dari bau bahan bakar dan adanya endapan air di tangki kendaraan. "Kalau menurut saya, kualitasnya memang menurun. Baunya sudah beda, dan ada endapan airnya," ujar Heri saat ditemui di bengkel PFAS GMP Krembangan.

Ia menjelaskan, sebelum kasus ini viral, pihaknya sempat didatangi tim dari Pertamina untuk pemerik-

sa keluhan pelanggan. Atas temuan itu, Heri langsung melaporkan ke pihak Pertamina pusat dan segera dilakukan inspeksi lapangan. Hasil pemeriksaan memperkuat dugaan adanya penurunan kualitas pertalite. Setelah dilakukan pengecekan pada sistem ke-listrikan kendaraan, hasilnya menunjukkan tidak ada masalah di bagian listrik.

"Akhirnya saya bongkar tangkinya. Setelah dicek, ternyata BBM-nya agak berbeda, ada campuran air dan baunya menyengat," jelasnya.

Bengkel PFAS GMP Krembangan mencatat sedikitnya enam kendaraan mengalami keluhan serupa. "Dua pelanggan sudah dilaporkan resmi, sedangkan empat lainnya sempat memperbaiki dengan dana pribadi sebelum ada program penggantian dari Pertamina," kata Heri.

Pertamina memberikan

kompensasi Rp 600.000 per kendaraan untuk perbaikan, meliputi tune-up dan cleaning saluran bahan bakar, termasuk pembersihan tangki, injektor, filter, hingga fuel pump.

Sementara itu, Kepala Bengkel PFAS GMP Perak Eko Prayitno mengatakan, sebagian besar kendaraan yang masuk ke bengkelnya merupakan mobil operasional milik pekerja. "Kalau di tempat kami, baru satu customer mobil yang mengeluhkan," ujarnya.

Eko menjelaskan, Pertamina memberikan reimburse sebesar Rp 600.000 untuk biaya tune-up dan cleaning bahan bakar. Prosedur klaim dilakukan dengan melampirkan struk pembelian BBM dan formulir keluhan dari SPBU. "Konsumen harus melengkapi data pembelian, tanggal, dan stempel SPBU resmi," ujar Eko. (edi/qia/yog/oni)

Mamdani Siap Hadapi Tekanan Politik Trump Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

DALAM PEMBANGUNAN: Proyek gedung Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo ditargetkan selesai akhir tahun ini. Anggaran untuk konstruksi fisik bangunan itu mencapai Rp 29 miliar.

Gedung Baru Punya Delapan Ruang Sidang

SIDOARJO - Pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo di Jalan Gading Fajar, hampir rampung. Targetnya akhir tahun ini selesai dibangun. Gedung baru PN Sidoarjo memiliki delapan ruang sidang yang akan dimaksimalkan untuk kegiatan persidangan.

Humas PN Sidoarjo Irianto Prijatna Utama menjelaskan jika gedung yang baru memang memiliki ruang lebih banyak dibanding bangunan lawas yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto. Selisihnya dua ruang. "Dengan semakin banyak ruang sidang akan lebih baik," kata Irianto.

Menurut dia, gedung baru itu dibangun berdasarkan instruksi dari Mahkamah Agung (MA). Luasan lahan semua kantor pengadilan minimal 2.900 meter persegi. Jumlah ruang sengaja ditambah karena saat ini perkara yang ditangani tak sedikit. "Nanti, fasilitas ruang tunggu dan parkir akan lebih luas," jelas Irianto.

Pembangunan gedung pengadilan memanfaatkan dana APBN. Nilainya mencapai Rp 29 miliar. Saat ini, proyek pembangunan gedung telah mencapai 75 persen. (edi/hen)

Jawa Pos

Hujan Deras Picu Banjir di Empat Kawasan

Rumah Pompa di Waru Mulai Diaktifkan

SIDOARJO - Hujan deras mengguyur wilayah Kota Delta Rabu (5/11) sore. Hal itu seakan menjadi pengingat agar masyarakat mulai waspada terhadap terjadinya bencana banjir. Hujan yang turun lebih dari tiga jam menyebabkan genangan di sejumlah kawasan.

Semisal di wilayah Waru. Ada genangan cukup tinggi di Jalan Joyoboyo yang terpantau pada Rabu malam. Genangan air setinggi lutut orang dewasa juga terlihat di depan Puskesmas Medaeng. Hal itu sempat membuat arus lalu lintas di jalan raya tersendat.

"Sampai pagi tadi (kemarin, Red) pukul 08.30 masih ada genangan. Namun tidak setinggi Rabu sore. Sekarang setinggi mata kaki atau 20 sentimeter," ujar Diky Pratama, salah satu warga sekitar kemarin (6/11).

Menurut dia, genangan air merata dari arah sungai di sebelah Perumahan Ta-



LEWATI GENANGAN: Para pengendara berhati-hati saat melintasi Jalan Joyoboyo yang digenangi air sejak Rabu (6/11) sore. Sebagian pemotor terpaksa putar balik untuk menghindari kemacetan.

man Waru Permai hingga depan Puskesmas Medaeng. Panjang genangan sekitar 300 meter. Adanya kendaraan sempat membuat kemacetan. Banyak motor putar balik karena menghindari cipratan air dan antrian kendaraan.

Selain di Waru, hujan deras juga dikabarkan menggenangi kawasan Pasar Krian.

Air masuk ke area pusat perbelanjaan. Namun hal itu tidak sampai mengganggu aktivitas perdagangan.

Jalan Joyoboyo Paling Terdampak

Camat Waru Nawari membenarkan adanya genangan di sejumlah titik di wilayahnya. Termasuk di Jalan Joyoboyo dan kawasan bawah

flyover Waru pada Rabu sore. "Memang hujan deras kemarin membuat genangan di beberapa lokasi, salah satunya di Jalan Joyoboyo dan bawah flyover Waru," jelasnya.

Menurut dia, pihaknya telah mengaktifkan sejumlah rumah pompa di sepanjang aliran Sungai Buntung untuk mempercepat penyusutan air di area bawah flyover

Waru. Pompa-pompa tersebut difungsikan untuk mencegah air menggenang lebih lama di jalan utama yang padat kendaraan. "Rumah pompa sudah diaktifkan semalam agar cepat surut," tambah Nawari.

Jalan Joyoboyo menurutnya sering diterjang banjir. Terakhir Jalan Joyoboyo banjir pada maret lalu. (eza/hen)

Jawa Pos

SATPOL PP



DOK. SATPOL PP SIDOARJO

DIBAWA KE MARKAS: Petugas Satpol PP memotong dua tiang reklame yang terbuat dari besi karena tak berizin.

Bongkar Dua Tiang Reklame Tak Berizin

SIDOARJO - Dua tiang reklame dari besi yang terpasang di Jalan Raya Waru dibongkar Satpol PP Rabu (5/11) malam. Kedua tiang itu diter-tibkan karena belum lengkap izinnya.

Kasi Ops Satpol PP Sidoarjo Novianto Koesno menjelaskan jika pembongkaran juga sudah sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 yang mengatur penindakan. Pemkab sebelumnya sudah melayangkan peringatan sampai tiga kali ke penyelenggara. "Tidak ada itikad baik sehingga dibongkar," ujarnya.

Menurut Novianto, setiap penyelenggara reklame wajib mengurus tiga perizinan. Yakni, Persetujuan Pendirian Reklame (PPR), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sekarang berubah menjadi Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG), dan Izin Pendirian Reklame (IPR). "Kalau tidak ada salah satu saja berarti menyalahi peraturan," katanya. (edi/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dampingi Ponpes Urus Izin Bangunan, Pemkab Sidoarjo Gandeng Akademisi

157 Lembaga Belum Kantongi Surat Persetujuan Bangunan Gedung

SIDOARJO – Belum semua pondok pesantren (ponpes) memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Di Sidoarjo, tercatat ada 157 ponpes yang terdata aktif namun belum memiliki dokumen tersebut. Pemkab menggandeng akademisi dari kampus untuk mendampingi lembaga pendidikan dalam mengurus izin bangunan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim-CTKR) Sidoarjo Mochamad Bachruni Aryawan mengatakan bahwa tenaga ahli dibutuhkan untuk menghitung struktur bangunan dan mengurus PBG. Kendalanya, pengelola ponpes merasa terbebani biaya perhitungan struktur bangunan dan pemenuhan standar teknis pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang cukup tinggi.

"Kami lantas kerjasama



ANGGER BONDAN/JAWA POS

MASIH DIPASANGI GARIS POLISI: Pemerintah bakal mendampingi Ponpes Al-Khoziny dalam mengurus izin bangunan. Ada akademisi yang dikerahkan untuk membantu.



Kami ingin ponpes di Sidoarjo bisa memenuhi standar bangunan yang aman dan legal tanpa harus terbebani biaya besar."

**Mochamad Bachruni
Aryawan**
Kepala Dinas Perkim-CTKR
Sidoarjo

dengan perguruan tinggi untuk melibatkan tenaga ahli bersertifikat dari kampus agar ponpes tak keluar biaya," katanya. Menurut Bachruni,

instansinya telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Narotama dan Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS). Nantinya juga dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Luas Lahan dan Struktur Jadi Dasar Pengajuan

Dalam prosesnya, kata Bahcruni, setiap bangunan memiliki ketentuan berbeda dan bergantung luas lahan, struktur, hingga keberadaan pagar dan halaman. "Kami ingin ponpes di Sidoarjo bisa memenuhi standar bangunan yang aman dan legal tanpa harus terbebani biaya besar," tuturnya. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



“Skrining dilakukan oleh puskesmas di wilayahnya masing-masing.”

dr Yanto Lipu

*Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM)
Dinas Kesehatan Sidoarjo*

TBC Sasar Usia 0-14 Tahun

Dinkes Targetkan 1.100 Skrining Tahun Ini

SIDOARJO – Tren kasus Tuberkulosis (TBC) memang turun dibanding 2024. Meski begitu, Pemkab melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo mengimbau masyarakat untuk terus waspada. Sebab masih ada 548 anak berusia 0-14 tahun yang terkena kasus TBC selama Januari-November tahun ini.

Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Sidoarjo dr Yanto Lipu mengatakan jika skrining dini dilakukan secara rutin oleh puskesmas. Petugas mendatangi sekolah secara langsung. “Skrining dilakukan oleh puskesmas di wilayahnya masing-masing” ujarnya kemarin (6/11).

Dinkes Sidoarjo menargetkan 1.100 lebih skrining TBC pada anak. Lokasinya tidak hanya di sekolah. Pe-

meriksaan juga dilakukan di fasilitas kesehatan. “Kami terus berupaya agar penemuan kasus bisa lebih cepat sehingga pengobatan bisa segera dilakukan,” tambah Yanto.

Secara keseluruhan, jumlah kasus TBC di Sidoarjo dari Januari hingga awal November 2025 mencapai 5.048 kasus. Sebanyak 4.500 kasus di antaranya merupakan penderita TBC pada usia dewasa. Meski menunjukkan tren penurunan, Dinkes masih menunggu hasil evaluasi akhir tahun untuk memastikan capaian penanganan TBC secara menyeluruh.

Yanto mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala batuk berkepanjangan, penurunan berat badan, atau berkeringat di malam hari. “Segera periksa ke puskesmas jika mengalami gejala tersebut. Penemuan dan pengobatan dini sangat penting untuk memutus rantai penularan, terutama di lingkungan keluarga,” paparnya. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Satpolairud Siaga Hadapi Puncak Musim Hujan dan Banjir Rob

KOTA-Menjelang puncak musim hujan yang diprediksi berlangsung pada November 2025 hingga Januari 2026, Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polresta Sidoarjo meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah pesisir.

Sebanyak dua perahu karet dan satu unit mobil operasional telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi banjir rob, puting beliung, hingga luapan air sungai di wilayah pesisir Sidoarjo.

Kasat Polairud Polresta Sidoarjo AKP Imam Yuwono

Ke Halaman 10

SIAGA: Kasat Polairud AKP Imam Yuwono melaksanakan patroli di kawasan pesisir Sidoarjo.



Satpolairud Siaga...

mengatakan, pihaknya juga menyiapkan tujuh personel khusus yang siap diterjunkan kapan pun dibutuhkan.

"Kami menyiapkan anggota khusus dari Satpolairud, sebanyak tujuh personel yang siap melaksanakan kegiatan apabila terjadi bencana hidrometeorologi di wilayah Sidoarjo," ujar AKP Imam, Kamis (6/11).

Menurutnya, meski hingga awal No-

vember belum ada laporan kondisi ekstrem di pesisir, potensi banjir rob tetap perlu diwaspadai. Terutama pada awal Desember, saat terjadi bulan purnama yang bertepatan dengan curah hujan tinggi.

"Untuk wilayah pesisir sementara masih aman. Namun, awal Desember kemungkinan bisa terjadi banjir rob," jelasnya kepada Radar Sidoarjo.

Ia menambahkan, banjir rob biasanya terjadi ketika pintu air dari

Mojokerto dibuka bersamaan dengan air laut pasang, sehingga air mengalir ke tambak-tambak dan sungai di wilayah Porong serta sekitarnya. Kondisi ini dapat menimbulkan gelombang hingga ke pemukiman pesisir di Sedati, Buduran, dan Jabon.

"Puncak musim hujan dan bulan purnama biasanya menimbulkan banjir rob. Di wilayah pesisir, air bisa sampai ke daratan," ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut,

Satpolairud Polresta Sidoarjo berkoordinasi dengan BPBD Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo, dan Basarnas guna memperkuat kesiapan lapangan serta memberikan peringatan dini kepada masyarakat, khususnya para nelayan.

"Kami berkoordinasi dengan BPBD dan Pemkab, serta mengimbau para nelayan agar tidak melaut jika kondisi cuaca ekstrem," tandasnya.

Berdasarkan data BMKG, sekitar 43,8 persen wilayah Indonesia telah

memasuki musim hujan. Puncaknya diperkirakan terjadi hingga Januari 2026, dengan fenomena La Niña yang berpotensi meningkatkan intensitas curah hujan hingga Februari mendatang.

AKP Imam juga mengimbau masyarakat, terutama di kawasan pesisir dan daerah rawan banjir seperti Tanggulangin, agar tetap waspada namun tidak panik menghadapi musim hujan tahun ini. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Belum Ada Apotek Desa Merah Putih yang Beroperasi

PROGRAM pendirian Apotek Desa Merah Putih di Sidoarjo ternyata belum berjalan. Meski sempat digadang-gadang bisa mempermudah akses obat bagi warga desa, hingga kini belum ada satu pun apotek yang resmi beroperasi.

Kabid Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DinkopUM) Sidoarjo, Karyani Arya Wijojok mengatakan, beberapa koperasi sudah menunjukkan minat untuk mendirikan apotek. Akan tetapi, semuanya masih dalam tahap persiapan. "Apotek belum ada yang operasional, cuma ada beberapa yang sudah minat, tapi belum ada yang operasional sama sekali, baru nyiapin tempat aja," ucapnya kepada Radar Sidoarjo, Rabu (5/11).

Arya menjelaskan, lambannya realisasi program tersebut karena masih menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Regulasi menjadi kunci agar koperasi memiliki dasar hukum yang jelas dalam membuka layanan kefarmasian.

● Ke Halaman 10



Belum Ada Apotek...

"Persyaratannya agak rumit juga sih, harus ada dokter, itu juga kalau klinik itu," jelasnya.

Dia menyebut, pemerintah kini tengah menyiapkan regulasi sistem

gerai koperasi. Nantinya, gerai-gerai Koperasi Merah Putih akan disera-gamkan dengan konsep pemanfaatan lahan, gedung, hingga gudang yang dimiliki pemerintah.

Sementara itu, dari sisi perizinan, pemerintah akan memastikan semua persyaratan

ajuan pendirian apotek dari koperasi manapun. Karena itu, hingga saat ini Dinkes belum melakukan verifikasi maupun pengawasan terhadap program tersebut. "Belum ada Apotek Merah Putih di Kabupaten Sidoarjo," tegas Kabid Koperasi dan Usaha Mikro (SDK) Dinkes Sidoarjo, dr. Rahmi.

Menurutnya, mekanisme perizinan apotek Merah Putih akan mengikuti aturan yang sama seperti apotek pada umumnya. "Sama aja, izin apoteknya sama, yang beda itu persyaratan aja, biar nanti bisa di cek," katanya. Untuk memastikan semua syarat sudah

daring melalui sistem OSS.go.id. Setelah pengajuan masuk, Dinkes akan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan sebelum menerbitkan Sertifikat Standar Apotek, yang dapat dicetak langsung melalui OSS.go.id. Untuk memastikan semua syarat sudah terpenuhi. (Sai/vga)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

DPRD Dorong Sinergi DLHK dan DPUBMSDA Atasi Sampah Sungai



M SAIFUL, RICHMANTRADARI SIDOARJO

BUTUH PERHATIAN: Sungai Desa Siwalanpanji, Buduran tampak dipenuhi sampah beberapa waktu yang lalu.

KOTA-Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih mendorong adanya sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) dalam menangani persoalan sampah di sungai. Ia menilai, kerja sama lintas dinas menjadi kunci agar masalah kebersihan sungai bisa segera teratasi.

"Kalau yang di sungai dianggap urusan PU, sedangkan yang di darat urusan DLHK, maka sampai kapan pun tidak akan selesai. Harusnya duduk bersama dan kerja bareng," ujarnya, Kamis (6/11).

Nasih menilai, menjaga

kebersihan sungai tidak cukup hanya dilakukan dengan pengerukan atau pengangkutan sampah semata. Diperlukan sinergi dan upaya berkelanjutan agar sungai tidak kembali menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga.

Ia juga mengajak masyarakat ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memiliki kesadaran, bahkan kerap membuang barang-barang besar seperti kasur dan perabot rumah tangga ke sungai.

"Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal kesadaran bersama," tegasnya.

● Ke Halaman 10



DPRD Dorong...

Selain memperkuat kolaborasi antarinstansi, DPRD juga mendukung langkah tegas Pemkab Sidoarjo dalam penegakan aturan. Operasi yustisi dan penerapan sanksi administratif diharapkan bisa menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

Nasih menambahkan, pengelolaan sampah di kawasan perumahan, pasar, dan industri juga harus dilakukan secara mandiri.

"Jangan semua diserahkan ke pemerintah. Pengelola kawasan harus punya tanggung jawab agar sampah tidak menumpuk di TPA," jelasnya.

Data dari UPT TPA Griyo Mulyo Ja-

bon mencatat, setiap bulan rata-rata menampung antara 1.700 hingga 1.800 ton sampah.

Angka tersebut, kata Nasih, seharusnya menjadi motivasi untuk memperkuat pengelolaan sampah mulai dari tingkat masyarakat.

Untuk menekan volume sampah, DPRD mendorong setiap desa segera

memiliki peraturan desa (perdes) tentang pengelolaan sampah.

"Kalau diatur dari bawah, kesadaran itu akan terbentuk lebih kuat. DLHK perlu mendorong hal ini," tuturnya.

Menjelang musim penghujan, Nasih juga mengingatkan agar pembersihan sungai dilakukan lebih intensif. Ia meminta DLHK dan DPUBMSDA mem-

bentuk tim gabungan untuk menangani titik-titik rawan serta melakukan pengawasan rutin.

"Kalau semua pihak bisa berkolaborasi secara konsisten, persoalan sampah bisa ditangani lebih cepat. Sidoarjo harus menuju konsep zero waste yang nyata, bukan hanya slogan," pungkasnya. (sai/vga)



Perkuat Sinergi, Bupati Terima Kunjungan Dankodaeral V Surabaya

KOTA-Bupati Sidoarjo Subandi menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Surabaya, Laksda TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si. di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab itu menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi, soliditas, dan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dengan jajaran TNI Angkatan Laut.

Dalam kesempatan tersebut, Laksda TNI Ali Triswanto menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan memperkuat hubungan yang selama ini sudah terjalin baik.

"Kerja sama antara Kodaeral V dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan wujud



SOLID: Bupati Sidoarjo Subandi menerima kunjungan kehormatan Kodaeral V Surabaya, Laksda TNI Ali Triswanto.

nyata sinergi antara TNI AL dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan wilayah

serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dankodaeral V menambahkan, melalui berbagai program kolaboratif, kedua pihak berkomitmen

untuk memperkuat keamanan maritim, ketertiban wilayah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sinergi tersebut tidak hanya terbatas

pada bidang pertahanan, tetapi juga mencakup sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Ia berharap hubungan harmonis antara Pemkab dan TNI AL dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

"Terima kasih atas kedatangan Dankodaeral V beserta rombongan. Pemkab Sidoarjo siap mendukung penuh kegiatan positif TNI AL yang memberi manfaat bagi masyarakat," ungkap Bupati Subandi.

Dankodaeral V juga menegaskan, TNI Angkatan Laut berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di wilayah kerja masing-masing secara lebih optimal. (sai/vga)

Bupati dan Dankodaeral V Bahas Sinergi Pembangunan dan Keamanan

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH., M.Kn. menerima kunjungan kehormatan (Courtesy Call) Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) V, Laksda TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si., di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Rabu sore, (5/11/25).

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kehangatan. Dankodaeral V menyampaikan bahwa kunjungannya kali ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI AL dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang selama ini telah terjalin dengan baik.

“Kerja sama antara Kodaeral V dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan wujud nyata sinergi antara TNI AL dan pemerintah daerah dalam mendukung



Bupati Sidoarjo H. Subandi, menerima kunjungan kehormatan Dankodaeral V, Laksda TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si., di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.

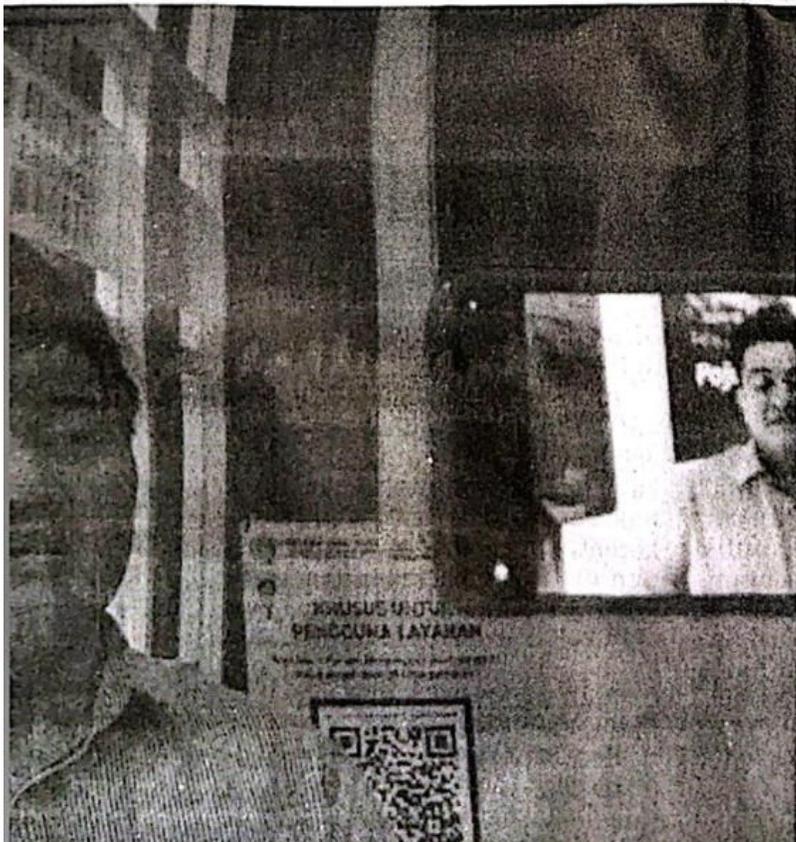
pembangunan wilayah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Laksda TNI Ali Triswanto.

Ia menambahkan, kolaborasi yang dibangun tidak hanya berfokus pada bidang pertahanan, tetapi juga mencakup sektor sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Melalui program-program bersama, TNI AL dan Pemkab Sidoarjo diharapkan dapat saling mendukung dalam memperkuat keamanan maritim dan ketertiban wilayah.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo siap mendukung upaya TNI AL dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah.

“Terima kasih atas kedatangan Dankodaeral V beserta rombongan. Kami mendukung penuh setiap kegiatan yang bersifat positif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Bupati Subandi Rabu sore (5/11/25)

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk menegaskan komitmen bersama antara TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi terciptanya keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. • Loe



TP PKK Sidoarjo

Bekali Calon Pengantin Edukasi Cegah Stunting, AKI, dan AKB

SIDOARJO - Keluarga merupakan pilar utama dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Keluarga yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai upaya mendukung tujuan tersebut, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan Implementasi Program Generasi Berencana (Genre) dalam rangka pencegahan stunting, angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB). Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Rabu sore, (5/11/25).

Melalui kegiatan tersebut, TP PKK berkomitmen bersinergi dengan program pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas.

Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, Hj. Sriatun Subandi, menyampaikan pentingnya pembekalan edukasi kepada calon pengantin sebagai langkah awal pencegahan stunting sejak dini.

“Dengan edukasi seperti ini, para calon pengantin diharapkan memperoleh pengetahuan yang cukup agar siap secara fisik dan mental sebelum memasuki masa pernikahan dan kehamilan,” ujar Sriatun.

Ia juga mengajak seluruh kader



LOETFI/DUTA

TP PKK Kabupaten Sidoarjo gelar Implementasi Program Genre cegah stunting, angka AKI dan AKB, di Pendopo Delta Wibawa, Rabu sore, (5/11/25).

PKK dari tingkat kabupaten hingga desa, serta organisasi masyarakat dan generasi muda, untuk aktif menyosialisasikan pentingnya perencanaan keluarga.

“Kami berharap kader PKK dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan keluarga. Pencegahan stunting, AKI, dan AKB harus menjadi gerakan bersama,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, peserta memperoleh materi dan berdialog langsung dengan Dra. Sofia Hanik, MM dari BKKBN Provinsi Jawa Timur,

yang memaparkan implementasi program Generasi Berencana. Selain itu, Dr. Harvey Alfin Hartono, S.PG, Fmas D.Mas FICS dari RSUD R. T. Notopuro juga memberikan penjelasan tentang kesehatan reproduksi serta pentingnya persiapan kehamilan yang sehat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para calon pengantin memiliki kesadaran lebih tinggi dalam membangun keluarga yang siap lahir batin, bebas stunting, dan berperan aktif dalam mewujudkan Zero Stunting di Kabupaten Sidoarjo. • Loe

DUTA

Jemaah Segera Lunasi Biaya Haji

► Kloter Pertama Jatim Berangkat 22 April 2026

JAKARTA, SURYA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menetapkan jadwal pelunasan ongkos perjalanan haji 2026. Pelunasan untuk jemaah haji khusus akan dimulai pada 11 November 2025, sementara jemaah haji reguler pada 19 November.

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11) mengatakan, persiapan dan tahapan ibadah haji 2026 sudah dimulai.

"Persiapan pelunasan BPIH, proses awal yang kami lakukan saat ini adalah penyusunan Keputusan Presiden tentang penetapan BPIH. Setelah terbitnya Ke-

STORY HIGHLIGHTS

- Pelunasan BPIH dibuka 11 dan 19 November untuk haji khusus dan reguler.
- Puncak ibadah haji berlangsung 25 Mei 2026.
- Penerbangan haji 2026 hanya Garuda dan Saudi Airlines

putusan Presiden tersebut, akan dimulai pelunasan tahap pertama yang kita pada 19 November 2025," sebut Irfan.

Irfan menjelaskan, pelunasan tahap pertama biaya perjalanan ibadah haji (Bi-

pih) untuk jemaah haji reguler akan diberikan kepada tiga kategori jemaah. "Pelunasan tahap pertama ini diperuntukkan untuk jemaah haji reguler lunas tunda berangkat, jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota keberangkatan tahun 2026 Masehi, dan prioritas jemaah haji reguler lanjut usia," kata Irfan.

Apabila setelah periode pertama masih terdapat kuota yang belum terpenuhi, lanjut Irfan, pemerintah akan membuka pelunasan tahap kedua. Menurut Irfan, tahap kedua ini diperuntukkan bagi beberapa kategori jemaah reguler, di antaranya adalah lansia, penyandang

KE HALAMAN 11

Misi Redam "Haaland dari Brasil"

TIMNAS Indonesia U-17 bersiap menghadapi tantangan terbesar mereka di Piala Dunia U-17 2025 Qatar. Pada matchday kedua Grup H, Garuda Asia akan berhadapan dengan Brasil U-17, tim dengan sejarah dan kualitas sepak bola yang menakutkan di Stadion Aspire Zone-Pitch 7, Jumat (7/11) pukul 22.45 WIB.

Brasil datang dengan status menakutkan—menang telak 7-0 atas Honduras di laga pembuka. Sementara Indonesia masih berusaha bangkit setelah kalah 1-3 dari Zambia.

"Untuk skuad asuhan Nova Arianto, pertandingan ini bisa menjadi penentu



Jemaah...

DARI HALAMAN 1

disabilitas, dan yang terpisah dari anggota keluarganya.

"Apabila sampai waktu yang ditentukan pada tahap pertama selesai dan masih ada kuota yang belum terpenuhi, maka akan dibuka pelunasan tahap kedua yang diperuntukkan untuk jemaah haji yang saat pelunasan tahap pertama mengalami kegagalan pelunasan, jemaah haji lanjut usia, serta jemaah haji penyandang disabilitas, dan jemaah haji terpisah dengan mahram atau keluarga, serta jemaah haji pada urutan berikutnya," jelasnya.

Selain pelunasan haji reguler, Kemenhaj juga menyiapkan pelunasan untuk jemaah haji khusus yang dimulai lebih awal, yakni pada 11 November 2025. "Pelunasan jemaah haji khusus direncanakan dilakukan

pada tanggal 11 November 2025. Tahap pertama ini akan diperuntukkan bagi jemaah haji khusus yang masuk alokasi kuota tahun 2026 Masehi dan jemaah haji khusus prioritas lansia," kata Irfan.

Kemenhaj memastikan seluruh tahapan pelunasan hingga pemberangkatan jemaah akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). "Kami berkomitmen agar proses pelunasan berjalan lancar dan jemaah bisa mempersiapkan keberangkatan dengan tenang," terang Irfan.

Dari Surabaya dilaporkan, kloter pertama Embarkasi Surabaya akan diterbangkan pada 22 April 2026. Kloter pertama dari provinsi Jatim ini sudah harus masuk Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada 21 April 2026.

Rabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jatim, Muhammad

Asadul Anam menuturkan bahwa pihaknya belum bisa memastikan kabupaten dan kota mana yang akan menjadi kloter pertama dari Provinsi Jatim.

"Nanti akan ada mekanisme tersendiri dalam penentuan kloter pertama di Embarkasi Surabaya. Tahapan sekarang jemaah siap-siap masuk setoran haji dulu," terang Anam, Kamis (6/11).

Saat ini sudah resmi diterbitkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah (Kemenhaj) 7/2025 tentang rencana perjalanan haji 1447 H/2026 M. Berikut rincian jadwal keberangkatan dan pemulangan jemaah haji sesuai keputusan Kemenhaj: 21 April 2026 (4 Dzulqad'ah 1447 H); Jemaah masuk Asrama Haji, 22 April 2026 (5 Dzulqad'ah 1447 H); Awal pemberangkatan jemaah gelombang I ke Madinah, 1 Mei 2026 (14 Dzulqad'ah 1447 H); Awal pemberangkatan jemaah gelombang I ke Makkah, 6 Mei 2026 (19 Dzulqad'ah

1447 H); Akhir pemberangkatan jemaah gelombang I ke Madinah, 7 Mei 2026 (20 Dzulqad'ah 1447 H); Awal pemberangkatan jemaah gelombang II ke Jeddah, 26 Mei 2026 (9 Dzulhijjah 1447 H); Wukuf di Arafah, 1 Juni 2026 (15 Dzulhijjah 1447 H); Awal pemulangan jemaah gelombang I dari Makkah ke Tanah Air, 15 Juni 2026 (29 Dzulhijjah 1447 H); Akhir pemulangan jemaah gelombang I dari Madinah ke Tanah Air.

Anam mengimbau kepada calon jemaah haji untuk menyiapkan diri dengan baik, termasuk pelunasan biaya haji. Saat ini jadwal pelunasan biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1447 H/2026 M atau biaya haji 2026 tahap pertama dimulai pada 19 November 2025.

Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1447 H/2026 M sebesar Rp 54,1 juta per orang. Angka ini lebih rendah dari usulan awal pemerintah, yakni Rp 54,9 juta per orang.

Sementara itu, Kepala UPT Asrama Haji Sukolilo Surabaya Gartamam akan lebih dini menyiapkan layanan paling nyaman untuk jemaah haji 2026.

(Tanggal) 21 April 2026

kloter pertama akan masuk Asrama Haji Sukolilo," terang Gartamam.

Puncak haji
Kemenhaj sudah merilis rencana perjalanan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Rencana ini disusun setelah pemerintah bersama Panitia Haji Komisi VIII DPR RI menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Proses operasional jemaah haji Indonesia insya Allah akan dimulai pada 21 April 2026 atau bertepatan dengan 4 Dzulqad'ah 1447 Hijriah, yang ditandai jemaah mulai memasuki asrama haji," ujar Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha di Jakarta.

Pemerintah dan DPR menyepakati rata-rata BPIH sebesar Rp 87,4 juta. Dari jumlah itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah rata-rata Rp 54,19 juta per orang.

Adapun gelombang pertama keberangkatan dimulai 22 April 2026 menuju Madinah Al-Munawwarah. Sementara gelombang kedua berangkat 7 Mei 2026 (20 Dzulqad'ah 1447 H) langsung menuju Makkah Al-Mukarramah. Seluruh kloter

ter gelombang kedua selesai diberangkatkan pada 21 Mei 2026 (4 Dzulhijjah 1447 H), bertepatan dengan penutupan pintu kedatangan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, pukul 24.00 waktu Arab Saudi.

Puncak haji berlangsung pada 25 Mei 2026 (8 Dzulhijjah 1447 H), saat jemaah bergerak ke Arafah. Wukuf di Arafah jatuh pada 26 Mei 2026 (9 Dzulhijjah). Idul Adha dirayakan sehari setelahnya, 27 Mei 2026, disusui hari-hari Tasyriq pada 28-30 Mei 2026.

Setelah rangkaian ibadah selesai, jemaah mulai bergerak kembali ke Madinah pada 1 Juni 2026. Pemulangan ke Tanah Air dijadwalkan mulai 5 Juni 2026 (19 Dzulhijjah 1447 H), dan seluruh jemaah diperkirakan sudah tiba di Indonesia pada 1 Juli 2026 (16 Muharram 1448 H).

"Rencana perjalanan ini menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan operasional haji 1447 Hijriah, termasuk persiapan layanan di embarkasi, penerbangan, akomodasi, transportasi, dan konsumsi di Tanah Suci," kata Ichsan.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menegaskan, pe-

nerbangan haji 2026 hanya akan dilayani dua maskapai. Dari tujuh maskapai yang mengikuti seleksi, hanya Garuda Indonesia dan Saudi Airlines yang lolos.

"Hasil evaluasi menunjukkan hanya Garuda Indonesia dan Saudi Airlines yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi, teknis, dan operasional yang telah ditetapkan," ujar Gus Irfan dalam Raker Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).

Garuda Indonesia akan mengangkut 102.502 jemaah dan petugas kloter dari embarkasi Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta Pondok Gede, Banten, Solo, Yogyakarta, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok. Sementara Saudi Airlines melayani 101.860 jemaah dari embarkasi Batam, Palembang, sebagian Jakarta Pondok Gede, Jakarta Bekasi, Kertajati/Indramayu, dan Surabaya.

Secara total, 204.362 jemaah dan petugas kloter akan diberangkatkan dalam 525 kelompok terbang melalui 14 bandara embarkasi/debarbasi di seluruh Indonesia. Operasional haji 2026 dijadwalkan berlangsung selama 30 hari. (tribun network/hd/dod/fal)

Derbi Jatim...

DARI HALAMAN 1

menilai faktor keamanan seharusnya bisa diantisipasi tanna nerlu memndah-

Sementara itu, pemain asing Persik Kediri, Imanol Garcia, menuturkan bahwa tim telah menjalani persiapan yang matang untuk menghadapi Persebaya.

La optimisista tim Macan

itu baru sekali dimainkan hingga pekan ke-11, itupun masuk dari bangku cadangan.

Padahal, striker asing diharapkan menjadi tumpuan produktifitas gol tim.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Warga Mutiara Regency Siapkan Ahli Hukum Melawan Bupati Sidoarjo, Warga Menolak Keras Dibukanya Akses Jalan Mutiara City



Warga Perumahan Mutiara Regency menepati pernyataan Bupati Sidoarjo, H. Subandi untuk menyiapkan tim ahli hukum guna memaparkan penolakan pembongkaran tembok pembatas untuk dijadikan akses jalan Mutiara City. Bila Bupati Sidoarjo memaksa, warga Mutiara Regency melawan bersama kuasa hukumnya untuk melaporkan potensi pelanggaran baik pidana atau administratifnya.

Dasar hukum yang digunakan Pemkab Sidoarjo adalah bahwa kedua pengembang telah menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, lahan dan jalan tersebut kini telah menjadi aset milik Pemkab Sidoarjo.

Namun, warga Mutiara Regency menolak rencana pembongkaran ini. Pada Rabu (5/11/2025), warga secara tegas menyatakan penolakan mereka. Ketua RW setempat, Hartono, mengatakan bahwa pihaknya masih akan menggelar rapat bersama warga untuk menentukan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh.

Tim Hukum Siapkan Kajian dan Langkah Hukum

Kuasa hukum warga Mutiara Regency, Urip Prayitno, SH., MH., menegaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan legal opinion sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah sebelum mengambil keputusan. "Kami akan melibatkan dua akademisi dari kampus di Surabaya untuk menyusun kajian hukum," kata Urip.

Kajian ini akan mengulas dasar hukum integrasi PSU, legalitas izin pembangunan Mutiara City, hingga potensi pelanggaran pidana jika penjeblolan tetap dilakukan tanpa memperhatikan norma perundang-undangan yang berlaku. Menurut Urip, akar persoalan bermula dari surat Kepala Desa dan pengembang kepada Dirjen terkait integrasi kawasan, tanpa melampirkan dokumen perizinan lengkap.

Ada Dugaan Pelanggaran dan Potensi Pidana

Urip menilai bahwa jika Pemkab tetap memaksakan pembongkaran, maka berpotensi melanggar sejumlah aturan, diantaranya UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU tentang Jalan.

"Jalan yang akan dijeblol itu berdiri di atas tanah kas desa (TKD) yang seharusnya berstatus jalan desa, bukan jalan kabupaten," ujarnya.

Pihak warga berencana melapor ke DPRD Sidoarjo, Ombudsman RI, bahkan Mendagri jika Pemkab tetap memaksakan rencana pembongkaran. "Kami akan melaporkan semua potensi pelanggaran, baik pidana maupun administratif," tegas Urip. (dar/nata/red)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Subandi Beri Waktu Seminggu, Warga Perumahan Mutiara Regency Akan Tempuh Jalur Hukum



SIDOARJO (RadarJatim.id) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH, M.Kn memberikan batas waktu selama 1 minggu kepada warga perumahan Mutiara Regency untuk memberikan pandangan hukum sebelum dilakukan rencana pembongkaran pagar pembatas di perumahan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Subandi setelah rapat koordinasi yang dihadiri oleh beberapa pihak di Opsroom Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (4/11/2025) sore kemarin.

Atas pernyataan dari Bupati Subandi itu, warga perumahan Mutiara Regency mengaku kecewa dan secara tegas menolak rencana pembongkaran pagar pembatas yang akan menjadi jalan penghubung dengan perumahan Mutiara City.

Subartono, Ketua Rukun Warga (RW) 016 Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo mengatakan bahwa warga perumahan Mutiara Regency menggelar rapat untuk menentukan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh, Rabu (5/11/2025).

“Kami diberikan waktu seminggu oleh Pemkab (Pemerintah Kabupaten, red) Sidoarjo untuk menyampaikan kajian hukum. Malam ini, warga akan kami ajak rapat untuk menentukan sikap kedepannya,” katanya.

Urip Pravitno, SH, MH selaku kuasa hukum warga Mutiara Regency menegaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan legal opinion sebagai bahan pertimbangan bagi Pemkab Sidoarjo sebelum mengambil keputusan.

“Kami akan melibatkan 2 akademisi dari kampus di Surabaya untuk menyusun kajian hukum. Kajian ini akan kami serahkan dalam waktu 1 minggu sebagaimana permintaan Pemkab (Sidoarjo, red),” tegasnya.

Kajian-kajian hukum dari 2 orang akademisi itu mengulas dasar hukum integrasi Prasarana, Sarana Utilitas (PSU), legalitas izin pembangunan perumahan Mutiara City, hingga potensi pelanggaran pidana.

Jika pembongkaran pagar pembatas di perumahan Mutiara Regency tetap dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo tanpa memperhatikan norma perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan oleh Urip Pravitno bahwa akar persoalan bermula dari surat Kepala Desa (Kades) Jati, Kecamatan Sidoarjo dan pihak pengembang perumahan Mutiara City kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait integrasi kawasan, tanpa melampirkan



dokumen perizinan lengkap. Seperti Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) serta dokumen perencanaan teknisnya.

“Dirjen (Perumahan dan Kawasan Permukiman, red) hanya menindaklanjuti surat tersebut tanpa data pendukung yang lengkap. Padahal dalam SKRK terakhir tahun 2024, tidak ada ketentuan bahwa Mutiara City terhubung langsung dengan Mutiara Regency,” jelasnya.

Jika Pemkab Sidoarjo tetap memaksakan pembongkaran, maka berpotensi melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU tentang Jalan.

“Jalan yang akan dijebol itu berdiri di atas Tanah Kas Desa (TKD) yang seharusnya berstatus jalan desa, bukan jalan kabupaten. Kewenangan pengelolaannya pun berada ditangan pemerintah desa,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Urip bahwa sebelum ada penetapan resmi status jalan dari Pemkab Sidoarjo, maka pembukaan akses jalan itu berpotensi melanggar kewenangan, karena Andalalin tahun 2019 belum pernah di review ulang.

“Seharusnya Bupati (Sidoarjo, red) mendorong review Andalalin 2019 terlebih dahulu. Jangan langsung membongkar pagar tanpa kajian dampak lalu lintas yang baru,” tambahnya.

Ia menilai bahwa langkah yang diambil oleh Bupati Subandi dan sejumlah pejabat, berpotensi melampaui kewenangan administratif. Karena itu, pihaknya berencana akan melapor ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, Ombudsman bahkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

“Kami akan melaporkan semua potensi pelanggaran, baik pidana maupun administratif. Pemkab Sidoarjo tidak boleh bertindak tanpa dasar hukum yang sah,” ucapnya.

Tidak hanya itu saja, pihaknya juga akan menempuh jalur hukum terkait adanya dugaan tekanan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur (Jatim) agar menerbitkan dokumen Andalalin yang baru.

“Kalau benar ada tekanan, agar Dishub Provinsi (Jatim, red) menerbitkan Andalalin tanpa kajian. Itu bentuk penyalahgunaan wewenang. Kami akan melaporkan juga ke Aparat Penegak Hukum,” paparnya. (mams)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tim Mabes Polri Datangi Pendopo Hingga Larut Malam, Ada Apa ?



SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-Suasana Pendopo Delta Wibawa, Rabu (5/11) malam, tampak berbeda dari biasanya. Sejumlah anggota kepolisian terlihat keluar masuk area pendopo. Dari pantauan beberapa media di depan pendopo, Kapolres Sidoarjo terlihat mendampingi tim dari Bareskrim Mabes Polri yang datang sekitar pukul 22.30 WIB. Hingga pukul 01.30, tim petugas akhirnya keluar pendopo, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai kasus apa yang tengah diselidiki.

Namun, informasi yang beredar menyebutkan bahwa tim Mabes Polri tengah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sejumlah awak media yang mencoba mengonfirmasi belum mendapatkan penjelasan baik dari pihak kepolisian maupun Pemkab Sidoarjo.

"Belum jelas terkait apa yang jelas memang ada tamu katanya dari Mabes Polri," ujar petugas jaga Pendopo. Sementara itu, suasana di sekitar pendopo tampak dijaga ketat.

Beberapa kendaraan dinas kepolisian terlihat terparkir di halaman depan, sementara akses masuk bagi tamu luar terlihat dibatasi. Hingga kini, belum ada penjelasan pasti dari Mabes Polri mengenai tujuan kabar pemeriksaan tersebut maupun siapa pejabat yang dimintai keterangan. (Abidin)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Warning Rekanan. Wabup Sidoarjo Kembali Sidak Progres Pekerjaan Revitalisasi Alun - Alun Sidoarjo



Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana memberikan perhatian khusus terhadap proyek Revitalisasi Alun - Alun Sidoarjo. Mimik Idayana kembali meninjau progres pengerjaan pekerjaan proyek itu, Rabu (05/11/2025) pagi. Ia ingin memastikan proyek yang menelan anggaran Rp 24,6 miliar itu selesai tepat waktu.

Mimik Idayana mewanti-wanti pelaksana proyek Alun - Alun agar dapat menyelesaikan sesuai masa kontrak kerjanya. Baginya, sisa waktu 1,5 bulan pengerjaan ini diminta dimaksimalkan.

"Tinggal satu setengah bulan ya Pak, mohon pekerjaannya dimaksimalkan," ujar Mimik Idayana kepada pelaksana proyek di Alun-Alun Sidoarjo.



Selain itu, Mimik Idayana ingin masyarakat Sidoarjo bisa segera dapat menikmati keindahan Alun-alun Sidoarjo.

"Karena itu, seluruh fasilitas yang dibangun dapat rampung sebelum tanggal berakhirnya kontrak kerja pada 15 Desember 2025 besok," tegas Wabup perempuan pertama di Sidoarjo ini. Bahkan Mimik, juga optimis proyek Alun-Alun Sidoarjo bisa selesai tepat waktu.



"Paniennya harus optimis selesai tepat waktu ya Pak," tandas Wabup ke pelaksana proyek lagi. Ary/Waw



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Warga Mutiara Regency Siapkan Ahli Hukum Melawan Bupati Sidoarjo, Warga Menolak Keras Dibukanya Akses Jalan Mutiara City



Warga Perumahan Mutiara Regency menepati pernyataan Bupati Sidoarjo, H. Subandi untuk menyiapkan tim ahli hukum guna memaparkan penolakan pembongkaran tembok pembatas untuk dijadikan akses jalan Mutiara City. Bila Bupati Sidoarjo memaksa, warga Mutiara Regency melawan bersama kuasa hukumnya untuk melaporkan potensi pelanggaran baik pidana atau administratifnya.

Dasar hukum yang digunakan Pemkab Sidoarjo adalah bahwa kedua pengembang telah menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, lahan dan jalan tersebut kini telah menjadi aset milik Pemkab Sidoarjo.

Namun, warga Mutiara Regency menolak rencana pembongkaran ini. Pada Rabu (5/11/2025), warga secara tegas menyatakan penolakan mereka. Ketua RW setempat, Hartono, mengatakan bahwa pihaknya masih akan menggelar rapat bersama warga untuk menentukan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh.

Tim Hukum Siapkan Kajian dan Langkah Hukum

Kuasa hukum warga Mutiara Regency, Urip Prayitno, SH., MH., menegaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan legal opinion sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah sebelum mengambil keputusan. "Kami akan melibatkan dua akademisi dari kampus di Surabaya untuk menyusun kajian hukum," kata Urip.

Kajian ini akan mengulas dasar hukum integrasi PSU, legalitas izin pembangunan Mutiara City, hingga potensi pelanggaran pidana jika penjeblolan tetap dilakukan tanpa memperhatikan norma perundang-undangan yang berlaku. Menurut Urip, akar persoalan bermula dari surat Kepala Desa dan pengembang kepada Dirjen terkait integrasi kawasan, tanpa melampirkan dokumen perizinan lengkap.

Ada Dugaan Pelanggaran dan Potensi Pidana

Urip menilai bahwa jika Pemkab tetap memaksakan pembongkaran, maka berpotensi melanggar sejumlah aturan, diantaranya UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU tentang Jalan.

"Jalan yang akan dijeblol itu berdiri di atas tanah kas desa (TKD) yang seharusnya berstatus jalan desa, bukan jalan kabupaten," ujarnya.

Pihak warga berencana melapor ke DPRD Sidoarjo, Ombudsman RI, bahkan Mendagri jika Pemkab tetap memaksakan rencana pembongkaran. "Kami akan melaporkan semua potensi pelanggaran, baik pidana maupun administratif," tegas Urip. (dar/nata/red)